

Turki Antara Sekularisme dan Aroma Islam; Studi atas Pemikiran Niyazi Berkes

Imron Mustofa
Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya
Email: stofa27@yahoo.com

Abstrak

Sejak Musthafa Kemal Attaturk menjadi presiden pertama di Turki, negeri bekas kekhalifahan Usmaniyah ini berubah total menjadi negara sekular. Kamal dengan tegas memisahkan persoalan agama dan politik. Agama tidak lagi menjadi kewenangan negara tetapi diberikan seluas-luasnya secara pribadi kepada masyarakat. Sekularisme yang berkembang di Turki pada masa Attaturk sempat menjadikan Turki sebagai Negara “Barat” yang ada di wilayah Timur Tengah dengan segala nuansa sekularisme tak ubahnya seperti suasana di negara-negara Eropa dan Amerika. Turki kemudian menjadi sebuah negara modern dibawah kepemimpinan Attaturk dan militer dijadikan sebagai “penjaga” terhadap ide sukularisme yang terus tumbuh di negara tersebut. Dibawah pemerintahan Erdogan, Turki cenderung menampakkan aroma Islamnya daripada sekularnya. Ini menarik untuk dikaji.

Kata kunci: Turki, secular, Islam

Pendahuluan

Sekularisasi telah menjadi permasalahan aktual, dan erat kaitannya dengan kehidupan eksistensial manusia. Di Barat,¹ sebagaimana yang telah

¹ Untuk melihat lebih dalam proses sekularisasi di Barat, memang dibutuhkan pemahaman secara komprehensif dan terpadu, ataupun secara heuristic terhadap proses perkembangan sosial politik masyarakat, begitu pula terhadap pemikiran filosofisnya secara historis. Karena dengan begitu akan dapat dilihat kemajuan atau proses perkembangan secara koprehensif yang direfleksikan melalui proses modernisasi. Sementara, itu istilah sekularisme baru muncul pada abad ke-19 khususnya melalui karya George Jacob Holyoake, yang mendefinisikan sekularisme sebagai sistem etik yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral alami (duniawi) dan terlepas dari agama atau prinsip supernatural. Namun ia juga membedakan konsep sekularisme dari sekularisasi. Ia menekankan bahwa sekularisme: “Jauh lebih terbatas jangkauannya dari pada sekularisasi, yang membela pencaharian-pencaharian yang sekuler melawan teologi menghantam atau merintanginya mereka. Akan tetapi pengetahuan yang murni sekuler terbatas pada pencaharian-pencaharian dirinya sendiri”. Dengan begitu, sekularisasi mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada sekularisme. Seperti kasus Perancis, sekularisme muncul sebagai akibat Enlightenment dan Revolusi Perancis. Sedangkan sekularisme lebih bersifat universal dan mempunyai kaitan erat dengan proses

dikemukakan oleh Smith, Berger, maupun para pemikir lainnya, bahwa sekularisasi merupakan suatu fenomena universal, dan tidak dapat dielakkan. Proses sekularisasi ini menyangkut segala bidang hidup dan kehidupan manusia yakni kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan terutama ilmu pengetahuan.² Pendapat yang demikian ini banyak ditentang oleh para pemikir Timur. Menurut mereka, sekularisasi bukanlah fenomena universal dan selain itu sekularisasi dapat dielakkan. Namun faktanya konsep ini telah marasuk dalam tubuh kaum Muslimin.

Di negara-negara Islam adalah Turki³ yang pertama kali, bahkan sebelum perang dunia II, konsep negara sekuler, agama, hukum, pendidikan dan ekonomi dipromosikan, serta doktrin sekulerisme diterapkan sebagai satu kebijakan politik, konstitusi, pendidikan dan budaya. Akan tetapi kebijakan ini tidak mendapat persetujuan dari semua bangsa muslim atau hampir semua individu muslim. Doktrin tersebut bahkan ditentang di Turki sendiri, dengan banyaknya klaim yang menyatakan bahwa Islam tidak cocok dengan sikap tersebut. Meskipun klaim-klaim seperti itu didasarkan pada kesadaran yang berbeda, semua sepakat bahwa Islam tidak bisa hanya menjadi kepercayaan bagi individu yang punya kata hati, melainkan Islam merupakan dasar bagi semua sistem sosial, dan agama Islam merupakan

perkembangan atau perubahan. Baca, Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, (Jakarta: Grafiti, 1993).

² Lihat, S.M. Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekularisme* (Bandung: Pustaka, 1981), 21.

³ Negara Turkin adalah negara di dua benua. Dengan luas wilayah sekitar 814.578 kilometer persegi, 97% (790.200 km persegi) wilayahnya terletak di benua Asia dan sisanya sekitar 3% (24.378 km persegi) terletak di benua Eropa. Posisi geografi yang strategis itu menjadikan Turki jembatan antara Timur dan Barat. Bangsa Turki diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Secara historis, bangsa Turki mewarisi peradaban Romawi di Anatolia, peradaban Islam, Arab dan Persia sebagai warisan dari Imperium Usmani dan pengaruh negara-negara Barat modern. Hingga saat ini bangunan-bangunan bersejarah masa Bizantium masih banyak ditemukan di Istanbul dan kota-kota lainnya di Turki. Yang paling terkenal adalah Aya Sofya, suatu gereja di masa Bizantium yang berubah fungsinya menjadi mesjid pada masa Khalifah Usmani dan sejak pemerintahan Mustafa Kemal hingga kini dijadikan musium. Peradaban Islam dengan pengaruh Arab dan Persia menjadi warisan yang mendalam bagi masyarakat Turki sebagai peninggalan Dinasti Usmani. Islam di masa ke khalifahan diterapkan sebagai agama yang mengatur hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah SWT sebagai Khalik, Sang Pencipta; dan juga suatu sistem sosial yang melandasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam yang muncul di Jazirah Arab dan telah berkembang lama di wilayah Persia, berkembang di wilayah kekuasaan Kekhalifaan Turki dengan membawa peradaban dua bangsa tersebut. Perkembangan selanjutnya memperlihatkan pengaruh yang kuat kedua peradaban tersebut ke dalam kebudayaan bangsa Turki. Kondisi ini menimbulkan kekeliruan pada masyarakat awam yang sering menganggap bahwa bangsa Turki sama dengan bangsa Arab. Suatu anggapan yang keliru yang selalu ingin diluruskan oleh bangsa Turki sejak tumbuhnya nasionalisme pada abad ke-19. Selanjutnya arah modernisasi yang berkiblat ke Barat telah menyerap unsur-unsur budaya Barat yang dianggap modern. Campuran peradaban Turki, Islam dan Barat, inilah yang telah mewarnai identitas masyarakat Turki. Lihat, Ade Solihat, "Kemalisme, Budaya dan Negara Turki", dalam <http://www.fib.ui.ac.id>.

agama yang sangat menyatu dengan setiap institusi sosial yang telah ada, yang kemudian mendapat cobaan yang berbahaya berupa upaya untuk memisahkan berbagai bidang tersebut dengan agama.⁴

Kesadaran nasionalisme Turki di kerajaan Usmani mulai timbul di pertengahan kedua dari abad kesembilan belas. Kerajaan Usmani, yang daerah kekuasaannya mencakup daerah-daerah arab di sebelah Timur dan daerah-daerah Eropa Timur di sebelah Barat, mempunyai rakyat yang terdiri atas berbagai bangsa yang menganut berbagai agama.

Pada mulanya kriteria agamalah yang dipakai untuk membedakan antara rakyat yang beraneka ragam kebangsaannya itu. Rakyat dikelompokkan menurut agamanya masing-masing dan istilah yang dipakai untuk pengelompokkan itu ialah *millet*, *Millet* berasal dari kata Arab *Millah* yang mengandung arti keyakinan dan agama. Rakyat dibagi kedalam Millet Islam, Millet Kristen, Millet Yahudi, dan sebagainya. Rakyat Turki dan rakyat Arab belum begitu sadar akan adanya perbedaan bangsa antara mereka, karena mereka memeluk agama yang sama, dan oleh karena itu termasuk dalam Millet yang sama.

Pada penutup abad kedelapan belas perasaan nasionalisme mulai mempengaruhi bangsa-bangsa Eropa Timur yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Usmani. Mereka mulai bergerak di abad berikutnya untuk memperoleh kemerdekaan masing-masing. Kesadaran akan adanya perbedaan bangsa dalam masyarakat Turki mulai timbul. Orang Turki dan orang Barat di Eropa Timur berbeda bukan hanya dalam agama tetapi juga dalam bangsa.

⁴ Lihat Niyazi Berkes, *The Development of Secularism in Turkey* (New York: Routledge, 1998). Fahaman sekularisme mencapai puncaknya di Dunia Islam pada 29 Oktober 1923. Mustafa Kemal Atatürk berkuasa di Turki lalu melaksanakan program mensekularkan masyarakat Turki secara sistematis. Atatürk memulai aliran ini dengan meletakkan kesemua pentadbiran urusan agama termasuk pendidikan Islam di bawah pengawalan pemerintahannya. Kemudian pada 1924, dia mengarahkan pihak tentara dan kaki tangan awam untuk memakai topi ala Barat dengan meninggalkan pemakaian fez, topi tradisional Turki. Tidak lama selepas itu, undang-undangan ditubuhkan untuk mengharamkan pemakaian fez dengan mewajibkan semua kaum lelaki Turki memakai topi ala Barat. Pada 17 Februari 1926, undang-undangan shari'ah digantikan dengan undang-undangan Switzerland yang telah diterjemah secara verbalim. Pada 9 April 1928 pula, peruntukkan Perlembagaan yang menghiytarkan bahwa Islam adalah agama negara telah dimansuhkan. Malah, pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah diharamkan. Undang-undang lain turut dibuat untuk meloloskan penggunaan tulisan Arab di dalam penulisan bahasa Turki. Sebaliknya tulisan Rumi pula yang digunapakai. Beberapa usaha turut dilakukan untuk menyingkirkan sejumlah istilah Arab dan Farsi dari khazanah bahasa Turki. Pada 1935, hari Ahad telah menggantikan hari Jumat sebagai hari Minggu. Gelar "pasha" telah diganti dengan nama keluarga (*family names*) seperti yang digunakan di Barat. Lihat "Sejarah Sekularisme" Artikel ini diterjemah dan disunting dari tulisan Dr. Ahmad Shafaat dari Montreal, Kanada. Artikel ini ditulis pada 25 November 2002. lihat ashafaat@jmsb.concordia.ca.

Para penentang sekularisme membuat dua kelompok yang saling bertentangan: kaum tradisional yang melihat ke belakang pada masa pertengahan Islam sebagai Islam yang “nyata” atau “murni”. Pandangan kaum modernis ini menimbulkan satu reaksi terhadap kebijakan sekularisme yang jelas dan membangkitkan banyak inspirasi untuk membangun ideologi totalitarian yang akan berguna sebagai satu pengganti terhadap bentuk-bentuk totalitarianisme orang-orang Eropa.⁵

Kita mengenal Turki sebagai bangsa yang pernah memimpin dunia Islam selama tujuh ratus tahun, dari permulaan abad ke-13 hingga jatuhnya Kekhalifahan Usmani pada awal abad ke-20. Fenomena kehidupan masyarakat Turki menjadi menarik ketika negara Turki berdiri tahun 1923 menyatakan sebagai sebuah negara sekuler, di mana Islam yang telah berfungsi sebagai agama dan sistem hidup bermasyarakat dan bernegara selama lebih dari tujuh abad, dijauhkan peranannya dan digantikan oleh sistem Barat.

Kita akan melakukan hal ini berkenaan dengan transformasi konteks sosial yang dipersembahkan oleh sejarah orang-orang Turki. Kita akan menguji secara proses sejarah dari sekularisasi yang mencapai titik kulminasi terjelasnya sebagai salah satu akibat dari adanya reformasi radikal yang berlangsung antara tahun 1927-1937. Reformasi-reformasi ini merupakan tanda yang pasti dari adanya satu puncak perpecahan dengan institusi dasar dari tradisi Islam abad pertengahan seperti yang tergambar dalam sejarah negara Turki Usmani dari abad ke-14 sampai abad ke-20.

Turki Menuju Sekuler

Dalam pandangan Niyazi, yang dianggap sebagai momentum pertama kontak antara Turki dengan dunia Barat adalah jatuhnya konstantinopel, ibukota Bizantium, ke tangan pasukan Turki Usmani dibawah pimpinan Sultan Mahmud II pada tahun 1853. Konstantinopel yang selanjutnya diganti menjadi Istanbul, adalah suatu kota metropolis yang berada di benua Asia dan Eropa. Inilah titik awal keemasan Turki Usmani, yang terus cemerlang hingga abad ke-18 dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas membentang dari Hongaria Utara di Barat hingga Iran di Timur; dari Ukraina di Utara hingga Lautan India di Selatan.

Turki Usmani berhasil membentuk suatu Imperium besar dengan masyarakat yang multi-etnis dan multi-religi. Kebebasan dan otonomi kultural yang diberikan Imperium kepada rakyatnya yang non-muslim, adalah suatu bukti bagi dunia kontemporer bahwa sistem kekhalifahan dengan konsep Islam telah mempertunjukkan sikap toleransi dan keadilan yang luhur.

⁵ Lihat Niyazi Berkes, *The Development of Secularism in Turkey*.

Sultan adalah sekaligus khalifah, artinya sebagai pemimpin negara, Ia juga memegang jabatan sebagai pemimpin agama. Kekhalifahan Turki Usmani didukung oleh kekuatan ulama (Syeikhul Islam) sebagai pemegang hukum syariah dan kekuatan tentara, yang dikenal dengan sebutan tentara Janissari. Kekuatan militer yang disiplin inilah yang mendukung perluasan Imperium Usmani, dan juga yang menyebabkan keruntuhannya pada abad ke-20.

Ciri khusus dari kebijakan Turki sebelum abad modern bisa dipahami lebih jelas dengan mementingkan fungsi ulama dalam pemerintahan ini. Kata ini adalah jamak dari kata *alim* yang berasal dari bahasa Arab *'ilm* (ilmu), kurang lebih yang artinya adalah ilmu agama. Jumlah keseluruhan dari orang-orang yang mempunyai ilmu ini tidak berarti sama juga dengan jumlah ulama. Seseorang mungkin saja pandai dalam ilmu agama namun menjadi pengikut/murid dari ulama tersebut. Pengikut ulama tersebut berasal dari institusi-institusi pendidikan yang disebut *madrasah*. Ini bukan semacam sekolah biasa atau katedral, atau serikat kerja, melainkan lembaga yang didanai dan dibiayai oleh penguasa. Penekanan kurikulumnya adalah pada hukum dan teologi. Tamatan yang mempunyai semacam gelar didaftarkan pada buku induk ulama sesegera setelah mereka menerima pengangkatan, seseorang mungkin bisa diangkat menjadi menteri agama (imam), sebagai konsultan hukum (mufti), atau menjadi hakim (qadi). Yang terakhir bisa diangkat pada posisi yang kurang begitu penting dalam sistem Turki, sekurang-kurangnya menjadi tenaga administrasi di pengadilan yang sesuai dengan syariat dan *Qanun* (Undang-undang), yang difungsikan untuk menjaga aturan-aturan yang ada.⁶

Akan tetapi yang kedua dari kelompok yang telah disebutkan di atas mempunyai manfaat yang lebih besar karena kelompok ini memainkan satu peran khusus dalam menjaga hubungan antara agama dan negara. Fungsinya adalah untuk menafsirkan syariat ketika ada persoalan-persoalan baru. Penafsiran ini disebut *ifta*, sedang pernyataan yang diberikan dalam penafsiran tersebut disebut *fatwa*. Ketika pernyataan tersebut berisi tentang persoalan undang-undang teknis, maka *mufti* yang bertugas memberikan keputusan tidak berwenang apa-apa, melainkan hanya seorang ahli hukum biasa yang memberikan nasehat hakit seperti juga pada masyarakat umum. Namun jika persoalan tersebut menyangkut masalah agama dan kepentingan politik, maka *mufti* memikul tanggung jawab yang sangat besar. Karena alasan inilah, peringkat *mufti* yang tertinggi disebut dengan *Syaikhul Islam* menjadi memiliki kewenangan dalam bidang agama yang tertinggi, hampir sama dengan kekuasaan *Sadrizam* dalam urusan-urusan negara. Pernyataan-pernyataan resminya bukan hanya menyangkut masalah-masalah agama,

⁶ Ibid.

melainkan juga masalah utama negara seperti pernyataan perang, berkaitan dengan negara non-muslim, pajak, inovasi-inovasi seperti penggunaan kopi atau tembakau dan pengenalan hasil penemuan seperti mesin cetak.⁷

Pada mulanya fatwa itu tidak mempunyai kewenangan yang resmi, sehingga sistem di Turki memberinya sanksi politik. Jabatan *Syaikhul Islam* itu terkadang masih bersifat ambigu dalam struktur pemerintahan. *Syaikhul Islam* itu diangkat oleh Padisah dari peringkat ulama yang tertinggi dan bisa dicopot dengan kehendak penguasa, namun fatwa darinya bisa memberhentikan Padisah. Akan tetapi *Syaikhul Islam* itu tidak mempunyai kekuasaan terhadap keputusannya, oleh karena itu dia harus menyandarkan diri pada aturan administratif dan militer. Sepanjang dia dan ulama saling berdampingan dengan penguasa dan melegitimasi keputusan-keputusannya, maka pemegang kekuasaan lainnya bisa dijauhkan. Ketika Padisah mencoba mengenalkan satu inovasi dan tidak didukung oleh ulama, maka dia tidak akan kuasa dalam banyak hal, yang kondisi ini bisa membuatnya menjadi kehilangan kekuasaannya.

Aturan ulama berbeda dengan aturan kependetaan dalam agama Kristen dalam sifat, fungsi dan juga dalam organisasinya. Hirarki yang berkembang di dalamnya bahwa aturan tersebut tidak mempunyai kesamaan dengan hirarkit kependetaan Kristen Katolik maupun Ortodoks. Mereka tidak membentuk kelompok agamis yang diorganisasikan melalui Gereja. Persoalan agama diorganisir tidak melalui satu Gereja yang otonom, melainkan oleh negara melalui aturan ulama yang membentuk satu badan resmi dan bersifat keduniaan. Hanya aturan-aturan mistis yang tetapi diluar aturan ini dan dekat dengan rakyat. Hanya bentuk inilah yang secara khusus terdapat institusi agama yang mengacuhkan urusan-urusan keduniaan. Perhatian utama para ulama adalah mengawasi bahwa perundang-undangan, administrasi dan pengadilan sudah sesuai dengan syariat. Seperti tujuan utama mereka adalah menjaga aturan tradisional yang tidak berubah dan dibuat lagi. Penekanan mereka terhadap aturan tersebut adalah sangat berpengaruh, yang ada akhirnya percobaan reformasi tersebut mengklaim diri bahwa mereka mencoba untuk memperbaiki *nizam* tersebut (yang pada umumnya tidak membangun istilah tersebut menjadi ada). Sebagaimana kita lihat kemudian, percobaan reformasi yang utama disebut dengan istilah *Nizam Baru*, *Tanzimat*, *Nizamati* yang semuanya berasal dari satu bahasa yang sama.⁸ Inilah yang menjadi awal munculnya upaya mencontoh teknologi militer Barat yang dianggap telah maju. Selanjutnya kondisi ini membawa Turki Usmani pada suatu masa pembaruan atau modernisasi.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

Kemalisme : Suatu Revolusi Budaya dan Negara (1923-1950)

Mustafa Kemal mendirikan Negara Republik Turki di atas puing-puing reruntuhan kekhalifahan Turki Usmani dengan prinsip sekularisme, modernisme dan nasionalisme. Meskipun demikian, Mustafa Kemal bukanlah yang pertama kali memperkenalkan ide-ide tersebut di Turki. Gagasan sekularisme Mustafa Kemal banyak mendapat inspirasi dari pemikiran Ziya Gokalp, seorang sosiolog Turki yang diakui sebagai Bapak Nasionalisme Turki. Pemikiran Ziya Gokalp adalah sintesa antara tiga unsur yang membentuk karakter bangsa Turki, yaitu ke-Turki-an, Islam dan Modernisasi.

Politik Kemalis ingin memutuskan hubungan Turki dengan selanjutnya yang lalu supaya Turki dapat masuk dalam peradaban Barat. Oleh karena itulah penghapusan kekhalifahan merupakan agenda pertama yang dilaksanakan. Pada tanggal 1 November 1922 Dewan Agung Nasional pimpinan Mustafa Kemal menghapuskan kekhalifahan. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1923 memindahkan pusat pemerintahan dari Istanbul ke Ankara. Akhirnya Dewan Nasional Agung pada tanggal 29 Oktober 1923 memproklamasikan terbentuknya negara Republik Turki dan mengangkat Mustafa Kemal sebagai Presiden Republik Turki.⁹

Setelah meniadakan kekhalifahan, politik Kemalisme menghapuskan lembaga-lembaga syariah, meskipun sebenarnya peranan lembaga ini sudah sangat dibatasi oleh para pembaru Kerajaan Usmani. Bagi Kemalis, syariat adalah benteng terakhir yang masih tersisa dari sistem keagamaan tradisional. Lebih lanjut lagi Kemalis menutup sekolah-sekolah madrasah yang sudah ada sejak tahun 1300-an sebagai suatu lembaga pendidikan Islam.

Reformasi agama, yang bentuknya upaya Turkifikasi Islam atau nasionalisasi Islam ini merupakan bentuk campur tangan pemerintah Kemalis dalam kehidupan beragama di masyarakat Turki. Sekularisme yang sejatinya memisahkan hubungan agama dengan pemerintahan, di mana negara menjamin kebebasan beribadah, bagi warga negara, pada pelaksanaannya dijalankan dengan semangat nasionalisme yang radikal dan dipaksakan oleh Kemalis. Namun penerapan nasionalisasi agama ini hanya bertahan hingga akhir pemerintahan Kemalis (Partai Rakyat Republik). Sejak tahun 1950, azan kembali diucapkan dalam bahasa Arab. Mesjid-mesjid di Turki pun hingga saat ini tetap menunjukkan bentuk-bentuk yang umum sebagaimana mesjid di negara-negara lainnya.

Peradaban menurut Mustafa Kemal, berarti peradaban Barat. Tema utama dari pandangannya tentang pem-Barat-an adalah bahwa Turki harus menjadi bangsa Barat dalam segala tingkah laku. Untuk itu Pemerintah

⁹ Lihat, Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1994).

Kemalis mengeluarkan kebijakan larangan menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap pakaian agama di tempat-tempat umum dan menganjurkan masyarakat Turki menggunakan pakaian a-la Barat. Sampai saat ini pemakaian topi menghilang bersamaan dengan menghilangnya kebiasaan memakai topi itu pada masyarakat Eropa.¹⁰

Selain reformasi agama, reformasi yang paling penting dari rezim Kemalis adalah reformasi bahasa. Tulisan Arab diganti dengan tulisan Latin, berdasarkan undang-undang yang diputuskan oleh Dewan Nasional Agung pada 3 November 1928. Tujuan reformasi bahasa adalah membebaskan bahasa Turki dari 'belunggu' bahasa asing. Penekanannya adalah pemurnian bahasa Turki dari bahasa Arab dan Persi. Mustafa Kemal mengadakan kunjungan di banyak tempat untuk mengajar secara langsung tulisan baru pada rakyat Turki.

Komite ahli hukum mengambil Undang-undang sipil Swiss untuk memenuhi keperluan hukum di Turki menggantikan Undang-undang Syariah, berdasarkan keputusan Dewan Nasional agung tanggal 17 Februari 1926. Undang-undang Sipil yang mmulai diberlakukan pada tanggal 04 Oktober 1926 ini antara lain tentang menerapkan monogami; melarang poligami dan memberikan persamaan hak antara pria dan wanita dalam memutuskan perkawinan dan perceraian. Sebagai konsekuensi dari persamaan hak dan kewajiban ini hukum waris berdasarkan Islam dihapuskan. Selain itu undang-undang sipil juga memberi kebebasan bagi perkawinan antar agama.

Pada 1 Januari 1935, pemerintah mengharuskan pemakaian nama keluarga bagi setiap orang Turki dan melarang pemakaian gelar-gelar yang biasa dipakai pada masa Turki Usmani. Mustafa Kemal menambahkan nama *Ataturk*, yang berarti Bapak Bangsa Turki, sebagai nama keluarga. Pada tahun 1935 sistem kalender hijriyah diganti dengan sistem kalender masehi; hari Minggu dijadikan hari libur menggantikan hari libur sebelumnya yaitu hari Jumat.

Tentang sekularisasi dan modernisasi di Turki pada masa Rezim Kemalis seperti diuraikan di atas, Bryan S. Turner,¹¹ seorang guru besar

¹⁰ Fukuyama menyorot dua kelompok agama yang menurutnya sangat sulit menerima demokrasi, yaitu Yahudi Ortodoks dan Islam Fundamentalis. Keduanya dia sebut sebagai *totalistic religious* yang ingin mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat publik maupun privat, termasuk wilayah politik. Meskipun agama-agama itu bisa menerima demokrasi, tetapi sangat sulit menerima liberalisme, khususnya tentang kebebasan beragama. Karena itulah, menurut Fukuyama, tidak mengherankan, jika satu-satunya negara Demokrasi Liberal di dunia Islam adalah Turki, yang secara tegas menolak warisan tradisi Islam dan memilih bentuk negara sekular di awal abad ke-20.

¹¹ Bryan S. Turner, *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber* (Jakarta: Rajawali Pers, 1984). juga *Ataturk's Republic of Culture*, (New York: The Office of the Ambassador for Cultural Affairs, Republic of Turkey, 1981), *The Ottomans A Brief Story of World Empire* (Ankara: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, 2000),

sosiologi di Universitas Flinders (Australia Selatan), menyimpulkan bahwa sekularisme tersebut merupakan suatu bentuk pemaksaan dari pemerintah rezim, bukanlah sekularisasi yang tumbuh sebagai suatu konsekuensi dari proses modernisasi seperti di negara-negara Eropa. Selain itu sekularisasi di Turki pada saat itu merupakan peniruan secara sadar pola tingkah laku masyarakat Eropa yang dianggap modern dan lebih maju. Meminjam istilah Darver¹² –sebagaimana yang dikutip oleh Binnaz Toprak– bahwa republik Turki adalah sebuah negara semi sekuler. Bagi Kemal, manusia Turki baru tidak saja harus berpikiran rasional seperti orang-orang Eropa, tetapi juga harus meniru tata cara berperilaku dan berpakaian seperti mereka. Karenanya tidak salah memang, jika Amien Rais,¹³ mengatakan dalam sebuah kata pengantar bahwa satu-satunya negeri Muslim yang pernah melancarkan sekularisasi besar-besaran adalah Turki pada masa Kemal Attaturk, dengan didukung oleh kekuasaan telanjang pemerintah Attaturk.

Masyarakat Turki Pasca Kemalisme

Mustafa Kemal meninggal dunia pada tanggal 10 November 1938, setelah tiga kali menjabat sebagai presiden Republik Turki, yaitu pada tahun, 1927, 1931 dan 1935. Mustafa Kemal diakui berhasil menciptakan sistem pemerintahan parlementer dan meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kehidupan demokratisasi di Turki. Daniel Lerner telah melakukan penelitian yang mendalam di suatu kota dekat Ankara pada tahun 1950-an, dan menyimpulkan bahwa negara Turki telah tumbuh menjadi negara yang relatif lebih stabil dan demokratis di bandung dengan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah.¹⁴

Turkey and the European Union: an Overview (Ankara: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, 2001)

¹² Lihat, Binnaz Toprak, *Islam dan Perkembangan Politik di Turki* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 89.

¹³ John J. Donohue; John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), xxi.

¹⁴ Ismet Inonu, mantan tangan kanan Ataturk yang kemudian berpisah dengannya karena konflik, menggantikan posisi kepresidenan Ataturk segera setelah yang terakhir ini wafat, tepatnya pada tahun 1938. Ia banyak melanjutkan apa yang telah dijalankan Ataturk. Selama perang dunia II, ia pada awalnya menjaga kenetralan Turki. Turki menjaga hubungan baik dengan Prancis, Inggris, dan Soviet, tapi tetap berhasil menandatangani pakta non-agresi dengan Jerman Nazi. Bulan Februari 1945, Turki akhirnya masuk ke dalam kancah peperangan dengan berada di pihak sekutu. Setelah perang dunia II berakhir, Turki memperoleh keuntungan dari Marshall Pasca Perang Dunia II, Turki kembali ke dalam demokrasi multi partai. Model multi parta ini berharga mahal bagi Inonu yang kehilangan kursi kepresidenannya pada tahun 1950, setelah kalah dalam pemilu. Partai Demokrat memenangkan pemilu tersebut dan mantan menteri masa Ataturk Celal Bayar menjadi presiden. Di bawah Presiden yang baru ini, Turki semakin dekat dengan Amerika Serikat. Ini ditandainya dengan bergabungnya Turki ke dalam NATO pada tahun 1952, yang sekaligus menandai berakhirnya politik anti imperialisme. Tahun 1957, rudal jarak menengah Amerika

Reformasi budaya, terutama sekularisasi agama dan pemakaian hukum Barat menggantikan hukum Islam, memperlihatkan proses dinamis dari penerimaan dan penolakan masyarakat Turki. Sekularisasi agama pada masa Kemal (1923-1950) melahirkan generasi Turki yang jauh dari agamanya. Bahasa Turki yang ditulis dalam bahasa latin telah menjadi bahasa nasional Turki. Sedangkan pemakaian hukum-hukum Barat juga diadaptasi dengan berbagai tingkatan kesulitan di berbagai lapisan masyarakat.

Pasca kekuasaan Musthafa Kemal, madrasah-madrasah kembali dibuka, sehingga para orang tua dapat kembali menyekolahkan anak mereka di sekolah agama, setelah mereka menyadari bahwa mereka tumbuh sebagai suatu generasi yang kering dari nilai dan ilmu agama. Madrasah-madrasah ini kembali ditutup pada tahun 1898 setelah dianggap sebagai lembaga yang mendidik kelompok Islam fundamental yang keberadaannya menguat dan mengancam ideologi sekuler Turki.

Perkembangan masyarakat di Turki menemukan karakter sendiri yang unit sebagai suatu bentuk pertentangan yang rumit antara pemikiran Kemalisme, yang fundamental dan radikal, pemikiran liberalis yang meskipun menentang Kemalisme tetapi tidak ingin ideologi ini diganti, dan pemikiran Islam, baik yang konservatif maupun moderat. Semangat masyarakat Turki modern untuk menjadi suatu bangsa yang modern dan demokratis, selalu disertai dengan kesadaran yang mendalam tentang watak dan idealisme ke-Turkia-an dan ke-Islaman. Penulis melihat bahwa gagasan sintesa tentang Islam, Turki dan Barat yang pernah dimunculkan oleh Ziya Gokalp (Bapak nasionalis Turki) mulai terimplementasikan dengan wajar dan alami, sedangkan Kemalisme dijadikan ideologi negara yang keberadaannya sangat dijaga oleh kekuatan militer Turki.¹⁵

Menurut pengamatan penulis, apa yang dikemukakan dalam buku Niyazi ini, merupakan kajian yang masih perlu penelusuran lebih jauh, misalnya perlu adanya ruang diskursus yang lebih luas tentang bagaimana hubungan secara diametral antara wilayah profan yang terus menerus mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan ilmu dan paradigma keilmuan dan wilayah sakral yang rentan terhadap sensitifitas – untuk tidak mengatakan bersifat deskriptif *an sich*. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang dipaparkan oleh Niyazi dalam buku ini sudah lebih dari cukup untuk mengenal lebih jauh sekularisme Turki yang dibawah Kemal Attaturk dan Ziya Gokalp dan berbagai implikasinya dalam kehidupan serta berbagai pendapat baik yang pro maupun yang kontra. Penulis berpendapat

ditempatkan di wilayah Turki. Lihat, Thierry Zarcone, *La Turquie: De l'Empire ottoman a la Republique d'Attaturk* (T.t.: Gallimard, 2005)

¹⁵ Lihat, Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang 1975), 126

bahwa apa yang telah ditulis oleh Niyazi perlu adanya pisau analisis yang lebih tajam dalam rangka untuk mempertegas paradigma keilmuan secara epistemologis sebagaimana yang dikatakan oleh Amin Abdullah,¹⁶ bahwa metode studi sosial-keagamaan diperlukan seperangkat analisis yang tidak saja melibatkan referensi klasikal tetapi juga berbagai disiplin lintas keilmuan yang disebut dalam bukunya sebagai metode integratif interkonektif.

Penutup

Transformasi di Turki dari negara tradisional menjadi negara sekuler mengilustrasikan adanya hubungan yang kompleks antara perubahan ekonomi dan teknis serta perubahan politik dan agama. Karena alasan inilah transformasi tersebut memiliki makna sejarah yang sangat berarti.

Semenjak perang dunia II, nasib negara-negara tersebut yang ketinggalan negara Barat dalam perkembangan ekonomi menjadi persoalan yang menjadi perhatian dunia luas. Namun persoalan tersebut jarang dilihat dari perspektif historis maupun budaya. Para ahli ekonomi dan para pembuat kebijakan sering juga menganggap bahwa negara-negara tersebut mampu mengembangkan ekonominya melalui bantuan eksternal meskipun budaya tradisional mereka tetap tidak berubah. Namun angan-angan untuk mengembangkan ekonomi seperti itu akan dikondisikan, dilanjutkan, atau digagalkan oleh faktor-faktor budaya tradisional maupun budaya yang baru. Meskipun seolah-olah hal tersebut menandakan bahwa perubahan ekonomi itu bisa memunculkan keselarasan kondisi sosial baru dengan pembangunan modern, sebagaimana telah ditunjukkan di atas, namun pada kenyataannya transformasi itu sangat diperlukan dalam struktur dan nilai politik, sosial, budaya dan agama sebelum perubahan ekonomi seperti bisa efektif.

Tanpa adanya perombakan pada struktur dan perilaku tradisional, maka perkembangan ekonomi modern dan bantuan teknis hanya akan menghasilkan sedikit perubahan yang kondusif. Ekonomi modern itu sendiri tidak hanya serpihan-serpihan teknologi yang terpinggirkan, melainkan bagian dari budaya yang kompleks. Akan tetapi rencana yang diajukan kepada negara tertinggal tersebut cenderung menunjukkan eksistensi kondisi budaya yang menyertai perkembangan ekonomi modern negara Barat. Dari kesemuanya tersebut di atas menandakan bahwa mereka terlupa tanpa adanya sekulerisasi masyarakat Barat, maka perkembangan modern tidak mungkin terjadi.

Struktur dan institusi tradisional dari semua lapisan masyarakat tertinggal sudah sangat dipengaruhi oleh peradaban modern. Secara sosial maupun kultural pengaruh ini menghambat daripada membangun, dan

¹⁶ Baca, Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif Interkonektif* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006).

masyarakat ini berhadapan bukan sekedar dengan persoalan kemajuan ekonomi namun juga membangun identitas nasional dan budaya yang baru. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah pada tingkatan di mana masyarakat yang dimiliki oleh budaya tradisional yang menghambat maupun berintegrasi dengan sendirinya berdasarkan pada dasar negara yang sekuler, baik secara sosial maupun kultural. Dalam banyak hal, pembangunan struktur sosial baru dan orientasi budaya mendapat pengaruh yang cukup besar dari politik baru dan konsep agama yang merupakan antitesa dari konsep tradisional tersebut. Persoalan ini khususnya ada di mana kekompleksan persoalan “politik-agama” tidak mempunyai sekat masuk ke dalam pasangan yang bisa dikenali atau yang bisa dibedakan.

Republik Turki yang berjumlah sekitar 55 juta itu sebanyak 99% adalah muslim dan antara ‘keislaman’ dan ‘keturkian’ telah menyatu sebagai identitas diri setiap orang Turki, berapapun kadar dan corak keislaman mereka. Sebutan ‘sekuler’ bagi negara Turki sejak mulanya sesungguhnya tidak tepat kalau istilah sekuler itu difahami dalam konteks negara Barat.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Amin. *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi Pedekatan Integratif Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ali, Mukti. *Islam dan sekularisme di Turki*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1994.
- Attas (al), S.M. Naquib. *Islam dan Sekulerisme*. Bandung: Pustaka, 1981.
- Berkes, Niyazi. *The Development of Secularism in Turkey*. New York: Routledge, 1998.
- Esposito, John L. et. al. *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Jurgensmayer, Mark. *Menentang Negara Sekular*. Bandung: Mizan, 1998.
- Nurcholish, Madjid. *Islam Kemoderanan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1993.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Pardoyo. *Sekularisasi dalam Polemik*. Jakarta: Grafiti, 1993.
- J., Tom Jacobs S. “Gereja dan Dunia” dalam *Gereja dan Masyarakat*, B.J. Banawiratman (ed.) T.t.: t.p., 1994.
- Shafaat, Ahmad. *Sejarah Sekularisme*. dalam ashafaat@jmsb.concordia.ca 25 November 2002.
- Solihat, Ade. *Kemalisme, Budaya dan Negara Turki*. dalam <http://www.fib.ui.ac.id>
- Turner, Bryan S. *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Webwe*. Jakakarta: Rajawali Pers, 1984.

- _____, *Ataturk's Republic of Culture* (New York: The Office of the Ambassador for Cultural Affairs, Republic of Turkey, 1981)
- _____, *The Ottomans A Brief Story of World Empir* (Ankara: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, 2000)
- _____, *Tukey and the European Union: An Overview* (Ankara: The Ministri of Foreign Affairs of the Republic on Turkey, 2001)
- Toprak, Binnaz, *Islam dan Perkembangan Politik di Turki* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)
- Zacrone, Thierry, *La Turquie: De l'Empire Ottoman a la Republique d'Ataturk* (T.t.: Gallimard, 2005)